



BAGIAN ANGGARAN 047

# LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



PERIODE YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020  
**AUDITED**



## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 4 Mei 2021  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia,



I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE., M.Si.



## Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Grafik	4
Pernyataan Telah Direviu	5
Pernyataan Tanggung Jawab	6
Ringkasan	7
I. Laporan Realisasi Anggaran	9
II. Neraca	10
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian PP-PA RI	13
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	16
A.3. Basis Akuntansi	18
A.4. Dasar Pengukuran	18
A.5. Kebijakan Akuntansi	18
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
B.1. Pendapatan	25
B.2. Belanja	26
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	42
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	50
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
Lampiran dan Daftar	62



## Daftar Tabel

Tabel 1	Rincian Satker dilingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode Tahun Anggaran 2020	17
Tabel 2	Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Menurut Jenis Belanja	24
Tabel 3	Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi Menurut Program	24
Tabel 4	Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	25
Tabel 5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	26
Tabel 6	Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Program Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	27
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	28
Tabel 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	30
Tabel 9	Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	30
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	31
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	33
Tabel 12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19 Periode 31 Desember 2020	36
Tabel 13	Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	43
Tabel 14	Rincian Nilai Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	44
Tabel 15	Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin Periode TA 2020	45
Tabel 16	Mutasi Nilai Aset Gedung dan Bangunan Periode TA 2020	45
Tabel 17	Rincian Nilai Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020	47
Tabel 18	Rincian Nilai Beban Pegawai Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	51
Tabel 19	Rincian Nilai Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	51
Tabel 20	Rincian Nilai Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	52
Tabel 21	Rincian Nilai Beban Pemeliharaan Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	53
Tabel 22	Rincian Nilai Beban Perjalanan Dinas Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	53
Tabel 23	Rincian Nilai Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	54
Tabel 24	Rincian Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	55
Tabel 25	Rincian Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	55
Tabel 26	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Untuk periode yang berakhir tanggal Per 31 Desember 2020 dan 2019	58



## Daftar Grafik

Grafik 1	Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Antar Satker Periode Tahunan Tahun 2020	29
Grafik 2	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	31
Grafik 3	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	33
Grafik 4	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	41





# LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020 *UNAUDITED***

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 25 Februari 2021  
Inspektur,

  
Fakhri Usman  
NIP.196910181989121001



## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 4 Mei 2021

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia,



I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE., M.Si.



## Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.505.098.537 atau mencapai 0 persen dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.00. Realisasi Belanja Negara sebesar Rp199.479.107.576 atau mencapai 98,03 persen dari Alokasi Anggaran sebesar Rp203.487.939.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020. Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp179.023.380.428 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp5.103.912.206; Aset Tetap (neto) sebesar Rp173.411.906.240; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp507.561.982. Nilai Kewajiban sebesar Rp1.255.590.261 berupa Kewajiban Jangka Pendek dan nilai Ekuitas sebesar Rp177.767.790.167 sehingga jumlah antara Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp179.023.380.428.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari kegiatan operasional, Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional, Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa, Pos luar biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp23.183.909, sedangkan jumlah Beban sebesar Rp215.090.780.830, sehingga terdapat Defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp215.067.596.921. Kegiatan Non Operasional Surplus sebesar Rp3.276.694.997 yang berasal dari Surplus Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp893.258.485 dan Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.383.436.512. Pos luar biasa sebesar Rp0.00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp211.790.901.924.



#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp188.632.295.519; Defisit-LO sebesar Rp211.790.901.924; koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp660.777.746. Transaksi antar entitas sebesar Rp200.265.618.826 sehingga nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp177.767.790.167. Nilai penurunan ekuitas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp10.864.505.352.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara. Sedangkan dalam penyajian Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



## I. Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN**  
**31 DESEMBER 2019**

URAIAN	CTT	31 DES 2020			31 DES 2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1</b>				
42 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp	- Rp	3.505.098.537	0,00%	Rp 3.606.815.371
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	Rp	- Rp	<b>3.505.098.537</b>	<b>0,00%</b>	Rp <b>3.606.815.371</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>					
51 Belanja Pegawai	B.2.1 Rp	47.926.225.000	Rp 47.412.373.226	98,93%	Rp 46.162.493.965
52 Belanja Barang	B.2.2 Rp	126.568.810.000	Rp 123.518.931.721	97,59%	Rp 426.825.711.429
Belanja Barang (Hibah Langsung)	B.2.3 Rp	2.710.454.000	Rp 2.636.681.421	97,28%	Rp 2.473.548.511
Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19	B.2.4 Rp	23.085.884.000	Rp 22.717.962.872	98,41%	Rp -
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	Rp	<b>200.291.373.000</b>	Rp <b>196.285.949.240</b>	<b>98,00%</b>	Rp <b>475.461.753.905</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.5 Rp	3.144.040.000	Rp 3.140.657.657	99,89%	Rp 3.962.273.386
532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	B.2.6 Rp	17.526.000	Rp 17.526.000	100,00%	Rp 782.185.000
536111 Belanja Modal Lainnya	B.2.7 Rp	35.000.000	Rp 34.974.679	99,93%	Rp -
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	Rp	<b>3.196.566.000</b>	Rp <b>3.193.158.336</b>	<b>99,89%</b>	Rp <b>4.744.458.386</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	Rp	<b>203.487.939.000</b>	Rp <b>199.479.107.576</b>	<b>98,03%</b>	Rp <b>480.206.212.291</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran e-rekon K/L periode Desember 2020

Jakarta, 4 Mei 2021  
Penanggungjawab UAPA,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia,



*[Signature]*  
Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE., M.Si.



## II. Neraca

### NERACA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

URAIAN	CATATAN	31 DES 2020	31 DES 2019	Naik/(Turun)
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	Rp 3.443.250	Rp 177.838.780	Rp (174.395.530)
Kas di Bendahara Penerimaan		Rp -	Rp -	Rp -
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	Rp 69.716.582	Rp 171.322.254	Rp (101.605.672)
Persediaan	C.4	Rp 5.030.752.374	Rp 5.831.258.497	Rp (800.506.123)
Persediaan yang belum Diregister		Rp -	Rp -	Rp -
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>Rp 5.103.912.206</b>	<b>Rp 6.180.419.531</b>	<b>Rp (1.076.507.325)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	C.5	Rp 2.358.220.000	Rp 1.626.120.000	Rp 732.100.000
Peralatan dan Mesin	C.6	Rp 95.363.456.859	Rp 95.673.691.804	Rp (310.234.945)
Peralatan dan Mesin Belum Diregister		Rp -	Rp -	Rp -
Gedung dan Bangunan	C.7	Rp 173.068.613.000	Rp 173.068.613.000	Rp -
Gedung dan Bangunan Belum Diregister		Rp -	Rp -	Rp -
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.8	Rp 5.152.456.725	Rp 5.152.456.725	Rp -
Aset Tetap Lainnya	C.9	Rp 315.310.076	Rp 315.310.076	Rp -
Konstruksi Dalam Pengerjaan		Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	Rp (102.846.150.420)	Rp (93.938.169.737)	Rp (8.907.980.683)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>Rp 173.411.906.240</b>	<b>Rp 181.898.021.868</b>	<b>Rp (8.486.115.628)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	C.11	Rp 15.642.888.379	Rp 17.798.326.700	Rp (2.155.438.321)
Aset Lain-lain	C.12	Rp 356.500.000	Rp 618.114.185	Rp (261.614.185)
Aset Lainnya yang Belum Diregister		Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	Rp (15.491.826.397)	Rp (15.871.117.549)	Rp 379.291.152
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>Rp 507.561.982</b>	<b>Rp 2.545.323.336</b>	<b>Rp (2.037.761.354)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>Rp 179.023.380.428</b>	<b>Rp 190.623.764.735</b>	<b>Rp (11.600.384.307)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	Rp -	Rp 100.000.000	Rp (100.000.000)
Hibah yang Belum Disahkan	C.15	Rp 1.252.147.011	Rp 1.713.630.436	Rp (461.483.425)
Pendapatan Diterima Dimuka	C.16	Rp -	Rp -	Rp -
Utang Muka dari KPPN	C.17	Rp 3.443.250	Rp 177.838.780	Rp (174.395.530)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.18	Rp -	Rp -	Rp -
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>Rp 1.255.590.261</b>	<b>Rp 1.991.469.216</b>	<b>Rp (735.878.955)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>Rp 1.255.590.261</b>	<b>Rp 1.991.469.216</b>	<b>Rp (735.878.955)</b>
<b>EKUITAS</b>	C.19	Rp 177.767.790.167	Rp 188.632.295.519	Rp (10.864.505.352)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>Rp 179.023.380.428</b>	<b>Rp 190.623.764.735</b>	<b>Rp (11.600.384.307)</b>

Sumber : Neraca e-rekon K/L periode Desember 2020.

Jakarta, 4 Mei 2021  
Penanggungjawab UAPA,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia,



Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE., M.Si.



### III. Laporan Operasional

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

URAIAN	CTT	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>	<b>D.1</b>			
PNBP Lainnya		Rp 23.183.909	Rp 72.971.138	Rp (49.787.229)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>Rp 23.183.909</b>	<b>Rp 72.971.138</b>	<b>Rp (49.787.229)</b>
<b>BEBAN</b>	<b>D.2</b>			
Beban Pegawai	D.2.1	Rp 47.412.373.226	Rp 46.162.493.965	Rp 1.249.879.261
Beban Persediaan	D.2.2	Rp 7.309.257.895	Rp 8.683.174.084	Rp (1.373.916.189)
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	Rp 79.865.414.608	Rp 150.213.784.257	Rp (70.348.369.649)
Beban Pemeliharaan	D.2.4	Rp 14.892.811.574	Rp 16.596.918.307	Rp (1.804.106.733)
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	Rp 34.371.142.327	Rp 226.861.813.886	Rp (192.490.671.559)
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2.6	Rp 16.742.136.649	Rp 26.873.304.273	Rp (10.131.167.624)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	Rp 14.397.644.551	Rp 21.698.172.718	Rp (7.300.528.167)
Beban lain-lain				
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>Rp 215.090.780.830</b>	<b>Rp 497.089.661.490</b>	<b>Rp (281.998.880.660)</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEG. OPERASIONAL</b>		<b>Rp (215.067.596.921)</b>	<b>Rp (497.016.690.352)</b>	<b>Rp 281.949.093.431</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>D.3</b>			
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>		<b>Rp 893.258.485</b>	<b>Rp (15.260.159)</b>	<b>Rp 908.518.644</b>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		Rp 1.108.293.555	Rp 44.697.000	Rp 1.063.596.555
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		Rp 215.035.070	Rp 59.957.159	Rp 155.077.911
		<b>Rp 2.383.436.512</b>	<b>Rp 1.064.135.087</b>	<b>Rp 1.319.301.425</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		<b>Rp 2.497.304.857</b>	<b>Rp 1.153.673.515</b>	<b>Rp 1.343.631.342</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		Rp 113.868.345	Rp 89.538.428	Rp 24.329.917
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
<b>JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEG. NON OPERASIONAL</b>		<b>Rp 3.276.694.997</b>	<b>Rp 1.048.874.928</b>	<b>Rp 2.227.820.069</b>
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>Rp (211.790.901.924)</b>	<b>Rp (495.967.815.424)</b>	<b>Rp 284.176.913.500</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>D.4</b>			
Beban Luar Biasa		Rp -	Rp -	Rp -
<b>SURPLUS/ (DEFISIT) LO</b>		<b>Rp (211.790.901.924)</b>	<b>Rp (495.967.815.424)</b>	<b>Rp 284.176.913.500</b>

Sumber : Laporan Operasional e-rekon K/L periode Desember 2020.

Jakarta, 4 Mei 2021  
Penanggungjawab UAPA,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia,



*[Signature]*  
I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE., M.Si.



# LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

URAIAN	CTT	31 DES 2020	31 DES 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
EKUITAS AWAL	E.1	Rp 188.632.295.519	Rp 129.556.664.637	Rp 59.075.630.882
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	E.2	Rp (211.790.901.924)	Rp (495.967.815.424)	Rp 284.176.913.500
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		Rp -	Rp -	Rp -
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	Rp 660.777.746	Rp 74.000.177.716	Rp (73.339.399.970)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	Rp -	Rp 100.000.000	Rp (100.000.000)
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.2	Rp -	Rp 12.731.250	Rp (12.731.250)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	Rp 732.100.000	Rp 76.122.689.506	Rp (75.390.589.506)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	Rp -	Rp (2.391.748.236)	Rp 2.391.748.236
Koreksi Lainnya	E.3.5	Rp (71.322.254)	Rp 156.505.196	Rp (227.827.450)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	Rp 200.285.618.826	Rp 481.043.268.590	Rp (280.777.649.764)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		Rp (10.864.505.352)	Rp 59.075.630.882	Rp (69.940.136.234)
EKUITAS AKHIR	E.5	Rp 177.767.790.167	Rp 188.632.295.519	Rp (10.864.505.352)

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas e-rekon K/L periode Desember 2020.

Jakarta, 4 Mei 2021  
Penanggungjawab UAPA,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia,



*[Signature]*  
Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE., M.Si.



## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

##### A.1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

**Kedudukan** : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Menteri.

**Tugas** : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

**Fungsi** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
- c. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- d. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
- e. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
- f. Pengelolaan data gender dan anak;
- g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- i. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



## A.1.2. Visi, Misi, dan Tujuan

**Visi** : Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.

**Misi** : 1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;  
2. Peningkatan perlindungan anak; dan  
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**Tujuan** Kemen. PP-PA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen. PP-PA adalah sebagai berikut:

### 1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

### 2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

### 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.



Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

#### **4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

#### **5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

#### **6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen. PP-PA**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen. PP-PA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.



### A.1.3. Susunan Organisasi

Pada bulan Agustus 2020 Kementerian PP-PA mengundang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencabut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga Kementerian PP-PA mengalami restrukturisasi organisasi sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Kementerian;
- 2) Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
- 3) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- 4) Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
- 5) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- 6) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak;
- 7) Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- 8) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- 9) Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga.

## A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian PP-PA. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PP-PA) ini merupakan laporan konsolidasi/gabungan dari seluruh jenjang struktural dibawah Kemen. PP-PA yang meliputi entitas akuntansi/satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan kepadanya. Jumlah satuan kerja dilingkup BA.047 Kemen. PP-PA untuk periode



# LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Tahun Anggaran 2020 adalah 41 satker yang terdiri dari 7 satker kantor pusat, dan 34 satker dekonsentrasi pada 34 provinsi.

Dari 41 satker yang ada, 41 satker sudah melakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan melalui aplikasi *E-Rekon&LK*. Rincian satker dilingkup Kemen. PP-PA sebagai berikut:

Tabel 1  
Rincian Satker dilingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Periode Tahun Anggaran 2020

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KETERANGAN	
			SUDAH	BELUM
1	427944 (KP)	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan	v	
2	664941 (KP)	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	v	
3	664958 (KP)	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	v	
4	664962 (KP)	Deputi Bidang Perlindungan Anak	v	
5	664979 (KP)	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	v	
6	664960 (KP)	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	v	
7	664983 (KP)	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	v	
8	060105 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Aceh	v	
9	075199 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Sumatera Utara	v	
10	080100 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Sumatera Barat	v	
11	100040 (DK)	Dinas PP-PA dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi	v	
12	090100 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Riau	v	
13	110101 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan	v	
14	305145 (DK)	Dinas PP-PA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk & KB Provinsi Kep.Babel	v	
15	325230 (DK)	Dinas PP-PA, Pengendalian Penduduk & KB Provinsi Kepulauan Riau	v	
16	260038 (DK)	Dinas PP-PA, Pengendalian Penduduk & KB Provinsi Bengkulu	v	
17	125160 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Lampung	v	
18	010058 (DK)	Dinas PP-PA dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	v	
19	295308 (DK)	Dinas PP-PA, Kependudukan & KB Provinsi Banten	v	
20	025133 (DK)	Dinas PP-PA dan KB Provinsi Jawa Barat	v	
21	035161 (DK)	Dinas PP-PA, Pengendalian Penduduk & KB Provinsi Jawa Tengah	v	
22	045161 (DK)	Dinas PP-PA dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	v	
23	055199 (DK)	Dinas PP-PA dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur	v	
24	135199 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Kalimantan Barat	v	
25	140100 (DK)	Dinas PP-PA, Pengendalian Penduduk & KB Provinsi Kalimantan Tengah	v	
26	150023 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Kalimantan Selatan	v	
27	160036 (DK)	Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur	v	
28	417749 (DK)	Dinas PP-PA, Pengendalian Penduduk & KB Provinsi Kalimantan Utara	v	
29	340103 (DK)	Dinas PP-PA, Pengendalian Penduduk & KB Provinsi Sulawesi Barat.	v	
30	180035 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Sulawesi Tengah	v	
31	190013 (DK)	Dinas PP dan PA Sulawesi Selatan	v	
32	200040 (DK)	Dinas PP-PA, Pengendalian Penduduk & KB Provinsi Sulawesi Tenggara	v	
33	170103 (DK)	Badan PP dan PA Provinsi Sulawesi Utara	v	
34	220037 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Bali	v	
35	230044 (DK)	Dinas PP-PA, Pengendalian Penduduk & KB Provinsi Nusa Tenggara Barat	v	
36	240100 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Nusa Tenggara Timur	v	
37	210006 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Maluku	v	
38	280100 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Maluku Utara	v	
39	310100 (DK)	Dinas Sosial, PP dan PA Provinsi Gorontalo	v	
40	250113 (DK)	Dinas PP-PA dan KB Provinsi Papua	v	
41	330100 (DK)	Dinas PP dan PA Provinsi Papua Barat	v	

Sumber: Monitoring e-rekon K/L periode TA 2020



## A.3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PP-PA adalah sebagai berikut:

### (1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya



(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CaLK.

## (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Piutang Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya:

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
  3. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

4. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi (TP/ TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/ TP/ TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - ✓ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - ✓ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan
  - ✓ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
  - ✓ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian



Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi yang dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 sudah tersaji pada Laporan Keuangan 2019, sedangkan revaluasi yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2020 akan disajikan dalam Laporan Keuangan ini. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa tanah, dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset



Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit	10



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Terpadu.	
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### (6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PP-PA) telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 2 kali dari DIPA awal dalam rangka optimalisasi belanja pemerintah, serta perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 2  
Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi  
Menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Uraian	Tahun Anggaran 2020		
		Awal	Revisi	Naik/(Turun)
51	Belanja Pegawai	Rp 46.792.409.000	Rp 47.926.225.000	Rp 1.133.816.000
52	Belanja Barang	Rp 211.264.885.000	Rp 152.365.148.000	Rp (58.899.737.000)
53	Belanja Modal	Rp 534.017.000	Rp 3.196.566.000	Rp 2.662.549.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 258.591.311.000</b>	<b>Rp 203.487.939.000</b>	<b>Rp (55.103.372.000)</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran e-rekon K/L 31 Desember 2020

Apabila dilihat dari program yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perubahannya sebagai berikut:

Tabel 3  
Perbandingan Nilai Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi  
Menurut Program

Kode Program	Uraian	Tahun Anggaran 2020		
		Awal	Revisi	Naik/ (Turun)
047.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA	Rp 103.538.035.000	Rp 97.024.259.000	Rp (6.513.776.000)
	HIBAH LUAR NEGERI	Rp -	Rp 1.844.642.000	Rp 1.844.642.000
047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 71.700.000.000	Rp 31.799.602.000	Rp (39.900.398.000)
	HIBAH LUAR NEGERI	Rp -	Rp 865.812.000	Rp 865.812.000
047.01.07	Program Perlindungan Anak	Rp 50.853.276.000	Rp 43.061.124.000	Rp (7.792.152.000)
047.01.08	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Rp 32.500.000.000	Rp 28.892.500.000	Rp (3.607.500.000)
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 258.591.311.000</b>	<b>Rp 203.487.939.000</b>	<b>Rp (55.103.372.000)</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja e-rekon K/L 31 Desember 2020

Sampai dengan bulan Desember 2020 Kemen PPPA melakukan 5 kali revisi anggaran, yaitu revisi anggaran kewenangan Kanwil Kementerian Keuangan sebanyak 2 kali dan revisi anggaran kewenangan Ditjen. Anggaran Kementerian Keuangan sebanyak 2 kali (salah satunya pemotongan anggaran dalam rangka *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19), dan revisi anggaran kewenangan Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb sebanyak 1 kali.



# LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

## B.1. PENDAPATAN -LRA

Realisasi Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.505.098.537 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan-LRA yang ditetapkan sebesar Rp0. Nilai estimasi pendapatan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PP-PA) tidak dianggarkan karena entitas tidak memperoleh pendapatan secara rutin (*Profit Centre*) sedangkan pendapatan yang ada berupa penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL), pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, dan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai.

Perbandingan nilai realisasi pendapatan-LRA dengan periode Tahunan TA 2019 sebagai berikut:

Tabel 4  
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Akun  
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Realisasi Pendapatan		Naik/ (Turun)
		31 DES 2020	31 DES 2019	
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp 1.108.293.555	Rp 44.697.000	Rp 1.063.596.555
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp 21.099.000	Rp -	Rp 21.099.000
425811	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp 1.342.000	Rp 35.544.924	Rp (34.202.924)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 1.451	Rp 32.901.787	Rp (32.900.336)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp 2.365.814.622	Rp 3.240.557.640	Rp (874.743.018)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	Rp 7.805.000	Rp 88.748.828	Rp (80.943.828)
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	Rp -	Rp 137.221.978	Rp (137.221.978)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp 742.909	Rp 27.143.214	Rp (26.400.305)
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 3.505.098.537</b>	<b>Rp 3.606.815.371</b>	<b>Rp (101.716.834)</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan e-rekon K/L 31 Desember 2020 dan 2019.

Nilai realisasi Pendapatan-LRA turun sebesar Rp101.716.834. Kenaikan signifikan terjadi pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 425129 sebesar Rp1.063.596.555 karena adanya lelang BMN berupa kendaraan dinas yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp1.062.738.000. Sedangkan penurunan signifikan terjadi pada Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 425912 sebesar Rp874.743.018. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kedisiplinan penyetoran pengembalian belanja sehingga penyetorannya tidak melewati tahun berjalan.



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp1.451 menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan realisasi sehingga pengembalian belanja tidak terlalu besar.

### B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PP-PA) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp199.479.107.576 atau mencapai 98,03 persen dari anggarannya sebesar Rp203.487.939.000 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp783.949.729.

Dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PP-PA) menjalankan 4 program yaitu (1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, (2) Program Perlindungan Anak, (3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen. PP-PA, dan (4) Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggaran dan Realisasi Belanja masing-masing program dirinci sebagai berikut:

Tabel 5  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program  
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kode Program	Uraian	31 DESEMBER 2020			Pengembalian Belanja
		Anggaran	Realisasi (netto)	%	
047.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA	Rp 97.024.259.000	Rp 95.302.444.788	98,23%	Rp 396.800.217
047.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA (HIBAH LN)	Rp 1.844.642.000	Rp 1.840.796.503	99,79%	Rp -
047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 31.799.602.000	Rp 31.341.901.486	98,56%	Rp 114.090.035
047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (HIBAH LN)	Rp 865.812.000	Rp 795.884.918	91,92%	Rp -
047.01.07	Program Perlindungan Anak	Rp 43.061.124.000	Rp 42.781.562.569	99,35%	Rp 157.835.202
047.01.08	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam PP dan PA	Rp 28.892.500.000	Rp 27.416.517.312	94,89%	Rp 115.224.275
JUMLAH		Rp 203.487.939.000	Rp 199.479.107.576	98,03%	Rp 783.949.729

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program, Desember 2020.



Sedangkan perbandingan nilai realisasinya pada periode Tahunan tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 6  
Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Program  
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Program	Uraian	PERIODE		
		31 DES 2020	31 DES 2019	Naik/ (Turun)
047.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA	Rp 95.302.444.788	Rp 132.727.118.877	Rp (37.424.674.089)
047.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA (HIBAH LN)	Rp 1.840.796.503	Rp 2.473.548.511	Rp (632.752.008)
047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 31.341.901.486	Rp 117.757.828.412	Rp (86.415.926.926)
047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (HIBAH LN)	Rp 795.884.918	Rp -	Rp 795.884.918
047.01.07	Program Perlindungan Anak	Rp 42.781.562.569	Rp 148.268.184.066	Rp (105.486.621.497)
047.01.08	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam PP dan PA	Rp 27.416.517.312	Rp 78.979.532.425	Rp (51.563.015.113)
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 199.479.107.576</b>	<b>Rp 480.206.212.291</b>	<b>Rp (280.727.104.715)</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program, Desember 2020 dan 2019.

Nilai realisasi belanja periode Tahunan tahun 2020 turun sebesar Rp280.727.104.715 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Penurunan yang signifikan disebabkan oleh turunnya realisasi belanja pada masing-masing program. Penurunan realisasi Belanja yang signifikan merupakan salah satu akibat dari pandemi COVID-19.

Laporan Keuangan Kemen. PP-PA merupakan konsolidasi/gabungan dari laporan keuangan seluruh entitas akuntansi/satuan kerja di lingkup Kemen. PP-PA. Dari 41 satker yang ada, yaitu 7 satker kantor pusat, dan 34 satker dekonsentrasi, semua satker telah menyampaikan data laporan keuangan dan dikonsolidasikan melalui aplikasi e-rekon.

Menurut satuan kerja, anggaran dan realisasi belanja dirinci sebagai berikut:



Tabel 7  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja  
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

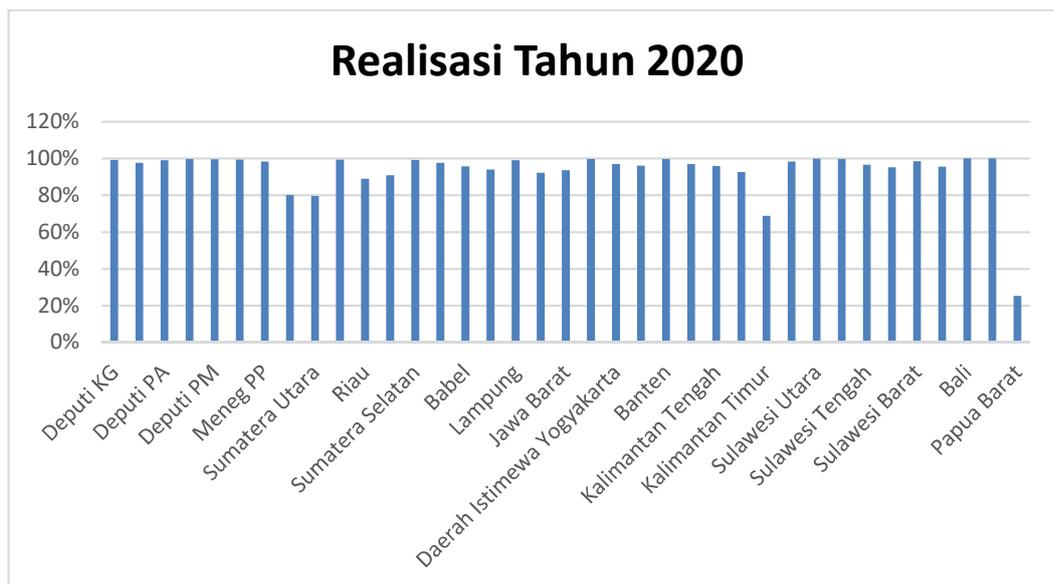
Kode Satker	Uraian Satker	TAHUN 2020			Pengembalian Belanja
		Anggaran	Realisasi (netto)	%	
<b>Satker Kantor Pusat</b>					
664941	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Rp 15.947.508.000	Rp 15.827.426.549	99,25%	Rp 14.878.640
664958	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Rp 16.717.906.000	Rp 16.310.359.855	97,56%	Rp 99.211.395
664962	Deputi Bidang Perlindungan Anak	Rp 19.207.848.000	Rp 19.029.789.711	99,07%	Rp 127.802.394
664979	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Rp 12.449.509.000	Rp 12.418.438.227	99,75%	Rp 29.853.808
664960	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Rp 8.892.500.000	Rp 8.844.019.283	99,45%	Rp 29.970.675
664983	KPAI	Rp 11.403.767.000	Rp 11.333.334.631	99,38%	Rp 179.000
427944	Menteri Negara PP	Rp 98.868.901.000	Rp 97.143.241.291	98,25%	Rp 396.800.217
<b>Satker Dekonsentrasi</b>					
060105	Aceh	Rp 650.000.000	Rp 519.867.444	79,98%	Rp -
075199	Sumatera Utara	Rp 650.000.000	Rp 517.219.750	79,57%	Rp -
080100	Sumatera Barat	Rp 612.000.000	Rp 607.847.387	99,32%	Rp -
090100	Riau	Rp 612.000.000	Rp 544.286.700	88,94%	Rp -
100040	Jambi	Rp 650.000.000	Rp 590.414.000	90,83%	Rp -
110101	Sumatera Selatan	Rp 612.000.000	Rp 606.627.100	99,12%	Rp -
305145	Kep. Babel	Rp 650.000.000	Rp 634.481.687	97,61%	Rp -
325230	Kep. Riau	Rp 650.000.000	Rp 621.728.429	95,65%	Rp 1.900.000
260038	Bengkulu	Rp 650.000.000	Rp 610.661.000	93,95%	Rp -
125160	Lampung	Rp 610.000.000	Rp 604.285.000	99,06%	Rp -
010058	DKI Jakarta	Rp 382.000.000	Rp 352.462.744	92,27%	Rp -
025133	Jawa Barat	Rp 650.000.000	Rp 608.145.500	93,56%	Rp -
035161	Jawa Tengah	Rp 726.000.000	Rp 724.090.500	99,74%	Rp -
045161	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp 535.000.000	Rp 518.886.000	96,99%	Rp -
055199	Jawa Timur	Rp 726.000.000	Rp 697.897.264	96,13%	Rp -
295308	Banten	Rp 612.000.000	Rp 609.791.000	99,64%	Rp -
135199	Kalimantan Barat	Rp 650.000.000	Rp 630.306.638	96,97%	Rp -
140100	Kalimantan Tengah	Rp 650.000.000	Rp 622.731.500	95,80%	Rp -
150023	Kalimantan Selatan	Rp 611.000.000	Rp 565.201.400	92,50%	Rp -
160036	Kalimantan Timur	Rp 650.000.000	Rp 446.475.600	68,69%	Rp -
417749	Kalimantan Utara	Rp 573.000.000	Rp 563.118.426	98,28%	Rp -
170103	Sulawesi Utara	Rp 622.000.000	Rp 620.827.200	99,81%	Rp -
180035	Sulawesi Tengah	Rp 382.000.000	Rp 381.000.000	99,74%	Rp -
190013	Sulawesi Selatan	Rp 726.000.000	Rp 701.003.800	96,56%	Rp 200.000
200040	Sulawesi Tenggara	Rp 650.000.000	Rp 618.705.200	95,19%	Rp 9.465.600
340103	Sulawesi Barat	Rp 573.000.000	Rp 564.259.210	98,47%	Rp -
220037	Bali	Rp 420.000.000	Rp 401.093.400	95,50%	Rp -
230044	Nusa Tenggara Barat	Rp 420.000.000	Rp 419.940.000	99,99%	Rp -
240100	Nusa Tenggara Timur	Rp 650.000.000	Rp 600.000.000	92,31%	Rp -
210006	Maluku	Rp 382.000.000	Rp 369.437.400	96,71%	Rp -
280100	Maluku Utara	Rp 650.000.000	Rp 649.775.600	99,97%	Rp -
310100	Gorontalo	Rp 650.000.000	Rp 649.527.000	99,93%	Rp -
250113	Papua	Rp 382.000.000	Rp 303.958.400	79,57%	Rp 73.688.000
330100	Papua Barat	Rp 382.000.000	Rp 96.445.750	25,25%	Rp -
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 203.487.939.000</b>	<b>Rp 199.479.107.576</b>	<b>98,03%</b>	<b>Rp 783.949.729</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Organisasi, Desember 2020.



Sedangkan perbandingan persentase realisasi belanja periode Tahunan tahun 2020 menurut satuan kerja dijelaskan sebagai berikut:

Grafik 1  
Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Antar Satker  
Periode Tahun 2020



Sumber : Laporan Realisasi Belanja Menurut Organisasi, E-Rekon&LK 31 Desember 2020

Sebagian besar satker dekonsentrasi baru merealisasikan belanja pada bulan Juli 2020. Dari total realisasi sebesar Rp199.479.107.576, realisasi (netto) Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Periode 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.735.488.872 yang terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp22.717.962.872 dan Belanja Modal sebesar Rp17.526.000.

Dari total realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp22.717.962.872, realisasi sebesar Rp15.324.723.768 merupakan langkah penanganan pandemi COVID-19 yang berupa pemberian paket pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak yang dibebankan pada akun 526322 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19.

Penyaluran bantuan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi pada tanggal 11 Juli 2020 sebagai salah satu rangkaian acara Hari Anak Nasional Tahun 2020.

Menurut jenis belanja, anggaran dan realisasi belanja Kementerian PP-PA dirinci sebagai berikut:



Tabel 8  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja  
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jenis Belanja	Uraian	TAHUN 2020			
		Anggaran	Realisasi	Persentase	Pengembalian Belanja
51	Belanja Pegawai	Rp 47.926.225.000	Rp 47.412.373.226	98,93%	Rp 46.478.798
52	Belanja Barang	Rp 152.365.148.000	Rp 148.873.576.014	97,71%	Rp 737.470.931
53	Belanja Modal	Rp 3.196.566.000	Rp 3.193.158.336	99,89%	Rp -
JUMLAH		Rp 203.487.939.000	Rp 199.479.107.576	98,03%	Rp 783.949.729

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Organisasi Akun, Desember 2020.

Sedangkan perbandingan nilai realisasi belanja dengan periode Tahunan TA 2020 sebagai berikut:

Tabel 9  
Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Jenis Belanja	Uraian	Realisasi Periode		
		31 DES 2020	31 DES 2019	Naik/(Turun)
51	Belanja Pegawai	Rp 47.412.373.226	Rp 46.162.493.965	Rp 1.249.879.261
52	Belanja Barang	Rp 148.873.576.014	Rp 429.299.259.940	Rp (280.425.683.926)
53	Belanja Modal	Rp 3.193.158.336	Rp 4.744.458.386	Rp (1.551.300.050)
JUMLAH		Rp 199.479.107.576	Rp 480.206.212.291	Rp (280.727.104.715)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Organisasi Akun, Desember 2020 dan 2019

Penjelasan realisasi belanja menurut jenis belanja secara rinci sebagai berikut:

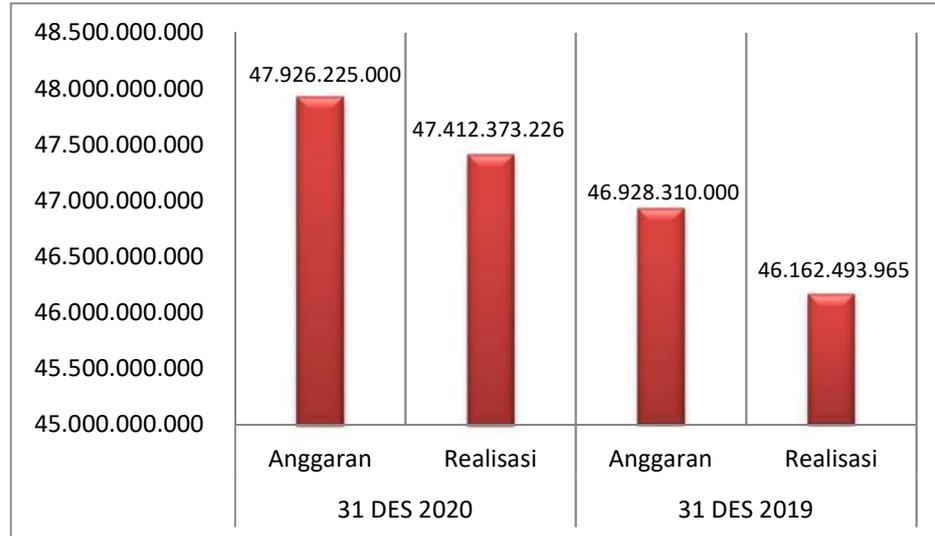
### B.2.1 Belanja Pegawai

Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:



**Grafik 2**

**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, Desember 2020.

Rincian nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp47.412.373.226 sebagai berikut:

**Tabel 10**

**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

Kode Akun	Uraian	Periode		Naik/(Turun)
		31 DES 2020	31 DES 2019	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 13.686.915.060	Rp 12.738.783.200	Rp 948.131.860
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp (2.546.710)	Rp 188.715	Rp (2.735.425)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 780.459.836	Rp 751.917.132	Rp 28.542.704
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 192.832.088	Rp 192.087.162	Rp 744.926
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 3.600.145.000	Rp 3.646.785.000	Rp (46.640.000)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 60.900.000	Rp 64.700.000	Rp (3.800.000)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 185.220.157	Rp 204.898.038	Rp (19.677.881)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 566.107.140	Rp 539.456.580	Rp 26.650.560
511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp 2.606.559.000	Rp 1.317.875.000	Rp 1.288.684.000
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	Rp 339.120.000	Rp 338.735.000	Rp 385.000
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	Rp 2.266.256.000	Rp 1.395.000.000	Rp 871.256.000
511512	Belanja Tunj. Pegawai Non PNS	Rp 170.629.650	Rp 157.500.000	Rp 13.129.650
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	Rp 22.959.776.005	Rp 24.814.568.138	Rp (1.854.792.133)
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 47.412.373.226</b>	<b>Rp 46.162.493.965</b>	<b>Rp 1.249.879.261</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut akun, Desember 2020 dan 2019.

Nilai realisasi belanja pegawai periode Tahunan TA 2020 naik sebesar Rp1.249.879.261 dari periode Tahunan TA 2019. Penyebab naiknya realisasi belanja pegawai adalah adanya kenaikan kelas jabatan pada jabatan struktural eselon 4 yang semula kelas jabatan 9 menjadi kelas jabatan 10 sebanyak 97 orang dan eselon 3 yang semula kelas jabatan 12 menjadi kelas jabatan 13 sebanyak 65 orang pada



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

periode Oktober s.d. Desember 2020. Kenaikan kelas jabatan tersebut menyebabkan kenaikan nominal tunjangan kinerja yang diterima pegawai sehingga realisasi Belanja Pegawai meningkat. Naiknya realisasi belanja pegawai yang signifikan juga dipengaruhi oleh kenaikan Belanja Uang Makan PNS sebesar Rp1.288.684.000 akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas.

Belanja Pembulatan Gaji PNS 511119 mengalami nilai minus sebesar Rp2.546.710 pada nilai Belanja Neto karena adanya kekeliruan pembebanan akun Potongan Gaji di satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :

No. SPM	Nominal (Rp)	Akun Semula	Akun Seharusnya
0022	18	425999	425911
0024	50	425999	511119
	185.000	425999	511151
	555.150	425999	425911
0025	57	425999	511119
0356	303	425999	511119
0357	560	425999	511119
0367	58	425999	511119
0387	169	425999	511119
0445	286	425999	511119
0452	202	425999	425911
0453	52	425999	425911
0454	44	425999	425911
0523	80	425999	511119
	555.000	425999	511151
	740.120	425999	425911

Kesalahan pembebanan akun tersebut menyebabkan Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 511119 sebesar Rp2.778.268 yang melebihi realisasi belanja sebesar Rp231.558, sehingga mengakibatkan nilai minus sebesar Rp2.546.710.

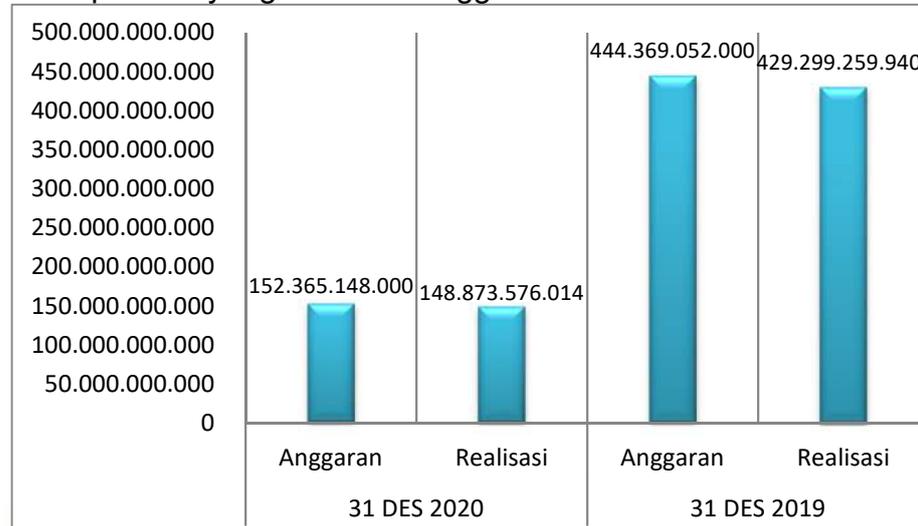
Kami sudah mengajukan ralat transaksi tersebut beberapa kali sejak bulan Oktober 2020 tetapi mengalami penolakan berulang. Penolakan tersebut sudah kami konsultasikan kepada verifikator, CSO KPPN Jakarta II, maupun Hai DJPB dan sudah berusaha kami perbaiki sesuai arahan. Pengajuan ralat terakhir pada tanggal 23 April 2021, dari total 17 SPM yang kami ajukan ralat, hanya 5 SPM yang diterima. Masih ada 12 SPM yang proses ralatnya tertolak hingga Laporan Keuangan ini disusun.

### B.2.2 Belanja Barang

Perkembangan nilai anggaran dan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:



**Grafik 3**  
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, Desember 2020

Rincian nilai realisasi belanja barang sebesar Rp148.873.576.014 sebagai berikut:

**Tabel 11**  
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Periode		Naik/(Turun)
		31 DES 2020	31 DES 2019	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 13.284.784.448	Rp 12.883.152.812	Rp 401.631.636
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 226.695.206	Rp 77.517.500	Rp 149.177.706
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 80.876.101	Rp 132.521.250	Rp (51.645.149)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 2.516.534.000	Rp 3.349.192.000	Rp (832.658.000)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 3.056.263.196	Rp 4.026.451.875	Rp (970.188.679)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 1.660.718.120	Rp -	Rp 1.660.718.120
521211	Belanja Bahan	Rp 5.139.538.963	Rp 30.930.135.416	Rp (25.790.596.453)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	Rp 3.279.270.250	Rp 5.571.836.000	Rp (2.292.565.750)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp 964.814.851	Rp 6.403.007.457	Rp (5.438.192.606)



# LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	Rp	31.500.000	Rp	-	Rp	31.500.000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	813.985.500	Rp	-	Rp	813.985.500
521811	Belanja Barang Persediaan Brng Kons.	Rp	5.580.873.141	Rp	8.448.201.662	Rp	(2.867.328.521)
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	Rp	84.451.821	Rp	59.361.451	Rp	25.090.370
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	1.011.074.250	Rp	-	Rp	1.011.074.250
522111	Belanja Langganan Listrik	Rp	2.518.376.431	Rp	2.446.729.674	Rp	71.646.757
522112	Belanja Langganan Telepon	Rp	109.537.784	Rp	100.466.573	Rp	9.071.211
522113	Belanja Langganan Air	Rp	595.776.664	Rp	553.317.786	Rp	42.458.878
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp	1.933.725.925	Rp	2.831.049.374	Rp	(897.323.449)
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	Rp	41.551.000	Rp	66.813.000	Rp	(25.262.000)
522131	Belanja Jasa Konsultan	Rp	5.683.744.615	Rp	8.004.672.978	Rp	(2.320.928.363)
522141	Belanja Sewa	Rp	8.208.488.918	Rp	8.685.139.439	Rp	(476.650.521)
522151	Belanja Jasa Profesi	Rp	11.677.097.159	Rp	28.238.469.000	Rp	(16.561.371.841)
522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp	11.631.676.420	Rp	34.670.053.602	Rp	(23.038.377.182)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	2.813.593.580	Rp	-	Rp	2.813.593.580
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	11.801.982.487	Rp	14.437.400.708	Rp	(2.635.418.221)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	119.610.458	Rp	124.595.000	Rp	(4.984.542)
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	3.114.470.081	Rp	4.288.873.361	Rp	(1.174.403.280)
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	-	Rp	35.000.000	Rp	(35.000.000)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	Rp	13.792.129.692	Rp	66.662.206.207	Rp	(52.870.076.515)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	613.020.000	Rp	1.293.632.452	Rp	(680.612.452)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp	8.540.856.005	Rp	53.586.766.191	Rp	(45.045.910.186)
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	1.093.867.654	Rp	-	Rp	1.093.867.654
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp	10.329.968.976	Rp	99.624.603.702	Rp	(89.294.634.726)
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	Rp	1.300.000	Rp	4.333.945.865	Rp	(4.332.645.865)
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	Rp	-	Rp	1.673.849.469	Rp	(1.673.849.469)
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	Rp	189.116.500	Rp	19.998.031.445	Rp	(19.808.914.945)
526122	Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk Uang	Rp	-	Rp	1.534.779.228	Rp	(1.534.779.228)
526123	Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Rp	-	Rp	50.000.000	Rp	(50.000.000)
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Rp	1.007.582.050	Rp	4.177.487.463	Rp	(3.169.905.413)
526322	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda bentuk barang-Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	15.324.723.768	Rp	-	Rp	15.324.723.768
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>148.873.576.014</b>	<b>Rp</b>	<b>429.299.259.940</b>	<b>Rp</b>	<b>(280.425.683.926)</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Akun, Desember 2020 dan 2019.

Perbandingan nilai realisasi belanja barang periode Tahunan tahun 2020 dan 2019 turun sebesar Rp280.425.683.926, menggambarkan bahwa turunnya realisasi belanja dipengaruhi secara signifikan oleh turunnya realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 524119, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524114 yang tidak banyak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19.

Belanja Barang Penghargaan dalam Bentuk Uang sebesar Rp31.500.000 merupakan hadiah uang tunai pada satker Deputy Perlindungan Hak Perempuan untuk kegiatan



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Kompetisi 3 Hari Bercerita dalam rangka Hari Dunia Anti Perdagangan Orang tanggal 27 Juli s.d. 6 Agustus 2020 dengan total hadiah sebesar Rp9.000.000 serta hadiah uang tunai pada satker Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk kegiatan Lomba Desain Logo KPAI dengan total hadiah sebesar Rp22.500.000.

### **B.2.3 Belanja Barang yang Bersumber dari Hibah Langsung**

Nilai anggaran dan realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah langsung periode TA 2020 sebesar Rp2.710.454.000 dan Rp2.636.681.421 atau mencapai 97,28 persen sedangkan pada periode TA 2019 sebesar Rp2.508.322.000 dan Rp2.473.548.511 atau mencapai 98,61 persen. Dari anggaran hibah sebesar Rp2.710.454.000, anggaran sebesar Rp1.844.642.000 terdapat pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA dan anggaran sebesar Rp865.812.000 terdapat pada Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Dari total realisasi hibah sebesar Rp2.636.681.421, realisasi sebesar Rp1.840.796.503 merupakan realisasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA yang berasal dari UNFPA yang diterima berdasarkan surat perjanjian hibah nomor PRODOC 29.03.2016 tanggal 26 Maret 2016 berupa pengesahan atas nilai realisasi Belanja Jasa Profesi 522151 sebesar Rp455.713.900, Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 sebesar Rp58.339.700, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524114 sebesar Rp746.631.652 selama periode Triwulan III 2020, sedangkan pengesahan nilai realisasi sebesar Rp583.955.599 berupa Belanja Jasa Profesi 522151 sebesar Rp331.246.300, Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 sebesar Rp32.384.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524114 sebesar Rp216.480.951 direalisasikan pada periode Triwulan IV 2020. Nilai pengembalian hibah sebesar Rp3.844.348 disetorkan kembali pada tanggal 24 Desember 2020.

Realisasi sebesar Rp795.884.918 merupakan realisasi Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang berasal dari *Ministry of Gender Equality and Family Republic of Korea (MoGEF)* yang diterima berdasarkan Record of Discussion antara MoGEF dan MoWECP tanggal 17 September 2020 berupa pengesahan atas nilai realisasi Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 521115 sebesar Rp23.520.000, Belanja Bahan 521211 sebesar Rp323.432.518, dan Belanja Honor Output Kegiatan 521213 sebesar Rp1.800.000, Belanja Jasa Konsultan 522131 sebesar Rp25.200.000, Belanja Jasa Profesi 522151 sebesar Rp151.600.000, Belanja Jasa Lainnya 522191 sebesar Rp48.500.000, Belanja Jasa Lainnya – Penanganan Pandemi COVID-19 522192 sebesar Rp1.143.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 524119 sebesar Rp220.689.400. Nilai pengembalian hibah sebesar Rp69.716.582 (setelah dikurangi biaya administrasi



transfer sebesar Rp806.367 dan bunga sebesar Rp524.226) disetorkan Kembali pada tanggal 13 Januari 2021.

#### B.2.4 Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalokasikan Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp 23.085.884.000 yang dibebankan pada APBN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12  
Rincian Anggaran dan Realisasi  
Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19  
Periode 31 Desember 2020

Akun	Uraian	TAHUN 2020			
		Anggaran	Realisasi (Neto)	Persentase	Pengembalian Belanja
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 1.724.082.000	Rp 1.660.718.120	96,32%	Rp 3.000.000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 824.201.000	Rp 813.985.500	98,76%	Rp -
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 1.029.033.000	Rp 1.011.074.250	98,25%	Rp -
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 2.901.946.000	Rp 2.813.593.580	96,96%	Rp 764.000
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 1.156.942.000	Rp 1.093.867.654	94,55%	Rp -
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 15.449.680.000	Rp 15.324.723.768	99,19%	Rp 10.635.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 23.085.884.000</b>	<b>Rp 22.717.962.872</b>	<b>98,41%</b>	<b>Rp 14.399.000</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Akun, Desember 2020

Realisasi anggaran Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp22.717.962.872 atau sebesar 98,41% dari total anggaran.

Rincian realisasi pada akun Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 521131 sebesar Rp1.660.718.120 adalah sebagai berikut:

- ❖ Satker Dinas PP DKI sebesar Rp1.860.544;
- ❖ Satker Dinas PP DIY sebesar Rp23.250.000;
- ❖ Satker Dinas PP Aceh sebesar Rp5.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Utara sebesar Rp8.744.750;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Barat sebesar Rp9.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Selatan sebesar Rp19.600.000;
- ❖ Satker Dinas PP Riau sebesar Rp6.670.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jambi sebesar Rp19.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Lampung sebesar Rp4.050.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Utara sebesar Rp3.843.963;



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Tengah sebesar Rp5.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Selatan sebesar Rp19.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Timur sebesar Rp19.320.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Utara sebesar Rp6.100.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Tengah sebesar Rp79.590.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Selatan sebesar Rp3.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Tenggara sebesar Rp6.900.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Barat sebesar Rp16.490.000;
- ❖ Satker Dinas PP Maluku sebesar Rp2.400.000;
- ❖ Satker Dinas PP Bali sebesar Rp7.500.000;
- ❖ Satker Dinas PP NTB sebesar Rp7.600.000;
- ❖ Satker Dinas PP NTT sebesar Rp15.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Bengkulu sebesar Rp16.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Banten sebesar Rp19.920.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jawa Tengah Rp3.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Gorontalo Rp19.000.000;
- ❖ Satker MenegPP sebesar Rp651.784.983;
- ❖ Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender sebesar Rp144.943.425;
- ❖ Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebesar Rp141.880.278;
- ❖ Satker Deputi Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp161.096.477;
- ❖ Satker Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp74.180.700;
- ❖ Satker Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Rp139.393.000.

Rincian realisasi pada akun Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi 521241 sebesar Rp813.985.500 adalah sebagai berikut:

- ❖ Satker Dinas PP DKI sebesar Rp19.281.500;
- ❖ Satker Dinas PP Bengkulu sebesar Rp7.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jambi sebesar Rp25.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Barat sebesar Rp6.700.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Selatan sebesar Rp34.400.000;
- ❖ Satker Dinas PP Babel sebesar Rp18.900.000;
- ❖ Satker Dinas PP Lampung sebesar Rp33.600.000;
- ❖ Satker Dinas PP Banten sebesar Rp25.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jawa Tengah sebesar Rp21.600.000;
- ❖ Satker Dinas PP DIY sebesar Rp28.800.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Barat sebesar Rp27.900.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Tengah sebesar Rp39.600.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Timur sebesar Rp31.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Selatan sebesar Rp25.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Utara Rp6.300.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Tengah sebesar Rp6.798.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Barat sebesar Rp25.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Tenggara Rp18.900.000;



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Selatan sebesar Rp25.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Maluku Rp20.400.000;
- ❖ Satker Dinas PP Gorontalo Rp25.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Bali sebesar Rp21.600.000;
- ❖ Satker Dinas PP NTB sebesar Rp10.000.000;
- ❖ Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Rp122.000.000;
- ❖ Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender sebesar Rp31.050.000;
- ❖ Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebesar Rp38.400.000;
- ❖ Satker Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat sebesar Rp3.026.000;
- ❖ Satker Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp34.740.000;
- ❖ Satker KPAI sebesar Rp80.590.000.

Rincian realisasi pada akun Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 521841 sebesar Rp1.011.074.250 adalah sebagai berikut:

- ❖ Satker Dinas PP Aceh sebesar Rp17.500.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Utara sebesar Rp7.360.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Selatan sebesar Rp34.400.000;
- ❖ Satker Dinas PP Babel sebesar Rp11.700.000;
- ❖ Satker Dinas PP Riau sebesar Rp7.800.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jambi sebesar Rp14.250.000;
- ❖ Satker Dinas PP Lampung sebesar Rp31.050.000;
- ❖ Satker Dinas PP Banten sebesar Rp10.800.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jawa Barat sebesar Rp6.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jawa Tengah sebesar Rp2.250.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jawa Timur sebesar Rp3.520.000;
- ❖ Satker Dinas PP DIY sebesar Rp24.340.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Utara sebesar Rp23.122.750;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Barat sebesar Rp41.741.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Tengah sebesar Rp24.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Timur sebesar Rp6.300.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Selatan sebesar Rp13.360.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Utara sebesar Rp28.300.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Tengah sebesar Rp17.650.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Selatan sebesar Rp24.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Tenggara sebesar Rp13.240.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Barat sebesar Rp20.065.000;
- ❖ Satker Dinas PP Bali sebesar Rp6.300.000;
- ❖ Satker Dinas PP NTB sebesar Rp21.400.000;
- ❖ Satker Dinas PP NTT sebesar Rp12.300.000;
- ❖ Satker Dinas PP Maluku sebesar Rp9.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Maluku Utara sebesar Rp50.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Gorontalo sebesar Rp6.050.000;
- ❖ Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp61.802.500;
- ❖ Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebesar Rp371.250.000;
- ❖ Satker Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp39.993.000;
- ❖ Satker Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat sebesar Rp41.930.000;
- ❖ Satker KPAI sebesar Rp8.100.000.



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Rincian realisasi pada akun Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 522192 sebesar Rp2.813.593.580 adalah sebagai berikut:

- ❖ Satker Dinas PP Kep.Riau sebesar Rp126.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Tengah sebesar Rp28.600.000;
- ❖ Satker MenegPP sebesar Rp1.256.448.870;
- ❖ Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender sebesar Rp80.921.000;
- ❖ Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebesar Rp239.262.660;
- ❖ Satker Deputi Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp113.200.000;
- ❖ Satker Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp500.463.500;
- ❖ Satker Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Rp285.397.550;
- ❖ Satker KPAI sebesar Rp183.300.000.

Rincian realisasi pada akun Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 524115 sebesar Rp1.093.867.654 adalah sebagai berikut:

- ❖ Satker Dinas PP Aceh sebesar Rp66.599.444;
- ❖ Satker Dinas PP Riau sebesar Rp40.077.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kep.Riau sebesar Rp7.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jambi sebesar Rp19.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Utara sebesar Rp13.050.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Barat sebesar Rp21.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Selatan sebesar Rp15.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Babel sebesar Rp3.150.000;
- ❖ Satker Dinas PP Lampung sebesar Rp59.400.000;
- ❖ Satker Dinas PP Banten sebesar Rp28.720.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jawa Barat sebesar Rp15.290.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jawa Tengah sebesar Rp18.450.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jawa Timur sebesar Rp9.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP DIY sebesar Rp18.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Utara sebesar Rp21.640.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Barat sebesar Rp2.100.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Tengah sebesar Rp19.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Timur sebesar Rp17.770.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Selatan sebesar Rp8.700.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Utara sebesar Rp24.200.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Tengah sebesar Rp6.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Barat sebesar Rp12.600.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Tenggara sebesar Rp40.630.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Selatan sebesar Rp30.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Maluku sebesar Rp30.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Maluku Utara sebesar Rp15.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Gorontalo sebesar Rp57.600.000;
- ❖ Satker Dinas PP Bali sebesar Rp48.600.000;
- ❖ Satker Dinas PP NTB sebesar Rp45.000.000;



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

- ❖ Satker Dinas PP NTT sebesar Rp56.724.100;
- ❖ Satker MenegPP sebesar Rp101.250.000;
- ❖ Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebesar Rp67.783.110;
- ❖ Satker Deputi Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp105.000.000;
- ❖ Satker Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp11.684.000;
- ❖ Satker Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Rp13.050.000;
- ❖ Satker KPAI sebesar Rp25.200.000.

Rincian realisasi pada akun Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19 526322 sebesar Rp15.324.723.768 adalah sebagai berikut:

- ❖ Satker Dinas PP Aceh sebesar Rp366.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Utara sebesar Rp391.414.200;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Barat sebesar Rp430.650.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sumatera Selatan sebesar Rp323.506.000;
- ❖ Satker Dinas PP Babel sebesar Rp375.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Riau sebesar Rp327.080.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kep.Riau sebesar Rp217.320.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jambi sebesar Rp181.440.000;
- ❖ Satker Dinas PP Bengkulu sebesar Rp57.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Lampung sebesar Rp298.900.000;
- ❖ Satker Dinas PP Banten sebesar Rp336.116.000;
- ❖ Satker Dinas PP DKI sebesar Rp266.020.700;
- ❖ Satker Dinas PP Jawa Barat sebesar Rp430.244.000;
- ❖ Satker Dinas PP Jawa Timur sebesar Rp491.117.624;
- ❖ Satker Dinas PP Jawa Tengah sebesar Rp410.400.000;
- ❖ Satker Dinas PP DIY sebesar Rp212.490.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Barat sebesar Rp382.371.638;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Utara sebesar Rp283.332.500;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Tengah sebesar Rp356.900.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Timur sebesar Rp269.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Kalimantan Selatan sebesar Rp322.150.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Utara sebesar Rp220.660.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Tenggara sebesar Rp364.747.800;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Tengah sebesar Rp174.767.000;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Barat sebesar Rp322.222.010;
- ❖ Satker Dinas PP Sulawesi Selatan sebesar Rp390.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Gorontalo sebesar Rp347.050.000;
- ❖ Satker Dinas PP Maluku sebesar Rp135.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Maluku Utara sebesar Rp390.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP Bali sebesar Rp210.000.000;
- ❖ Satker Dinas PP NTB sebesar Rp209.940.000;
- ❖ Satker Dinas PP NTT sebesar Rp245.680.550;



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

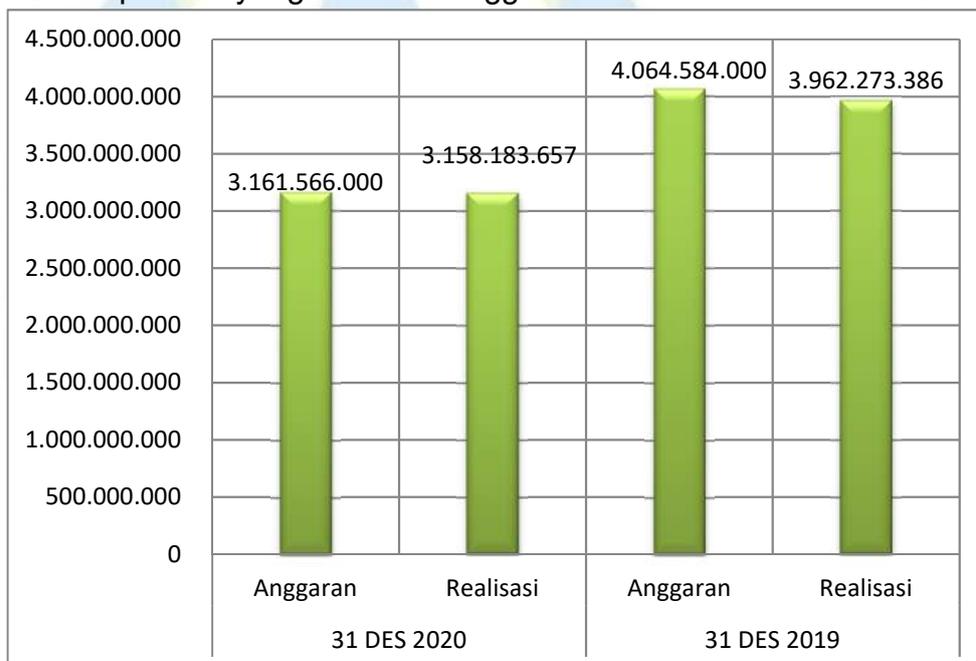
- ❖ Satker MenegPP sebesar Rp99.998.710;
- ❖ Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender sebesar Rp1.009.333.000;
- ❖ Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebesar Rp1.305.536.340;
- ❖ Satker Deputi Bidang Perlindungan Anak sebesar Rp1.500.302.640;
- ❖ Satker Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp1.122.619.844;
- ❖ Satker Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Rp548.413.212.

### B.2.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Perbandingan nilai anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Grafik 4

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Akun, Desember 2020 dan 2019.

Nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.158.183.657 seluruhnya menghasilkan perolehan aset peralatan dan mesin. Dari realisasi sebesar Rp3.158.183.657, realisasi sebesar Rp17.526.000 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 satker KPAI.

### B.2.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi COVID-19

Realisasi sebesar Rp17.526.000 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 satker KPAI menggunakan akun 532119 dengan rincian sebagai berikut :



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

1. Tenda Samafi Kerucut sebesar Rp8.570.000
2. Mesin Foding sebesar Rp2.806.000
3. Wastafel Injak Portable sebesar Rp2.150.000
4. Infrared Thermogun sebesar Rp4.000.000

### **B.2.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Nilai anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0.00.

### **B.2.8 Belanja Modal Lainnya**

Nilai anggaran dan realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp35.000.000 dan Rp34.974.679. Sedangkan nilai anggaran dan realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp783.170.000 dan Rp782.185.000.

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.443.250 sedangkan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp177.838.780. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 terdiri dari Uang Persediaan sebesar Rp3.443.250 yang merupakan sisa Uang Persediaan satker Papua Barat.

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.443.250 tersebut telah dipertanggungjawabkan menggunakan akun 815114 pada tanggal 19 Februari 2021.

### **C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Selain itu, nilai Kas Lainnya dan Setara Kas juga mencakup Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 69.716.582 dan Rp171.322.254 Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai berikut:



Tabel 13  
Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas  
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No	Keterangan	31 DES 2020	31 DES 2019
1	Pungutan Pajak yang belum disetor ke KUN	Rp -	Rp -
2	Pengembalian Belanja yang belum disetor ke KUN	Rp -	Rp 4.219.848
3	Utang kepada pihak ketiga lainnya	Rp -	Rp -
4	Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari Hibah yang belum disahkan	Rp 69.716.582	Rp 167.102.406
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 69.716.582</b>	<b>Rp 171.322.254</b>

Sumber : Daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 merupakan saldo kas hibah yang berasal dari pengembalian atas penerimaan hibah langsung tahun 2020 yang tidak terealisasi sebesar Rp 69.716.582 dan belum dilakukan pengesahan atas transaksi pengembaliannya dalam bentuk SP3HL/SP4HL sampai dengan 31 Desember 2020. Pengembalian hibah tersebut sudah disetorkan kembali pada tanggal 13 Januari 2021, sehingga masuk transaksi TA 2021.

Sedangkan pada saldo per 31 Desember 2019 terdapat pengembalian belanja tahun 2018 atas kelebihan pembayaran belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang sebesar Rp4.219.848 yang penyetorannya dilakukan pada tahun 2019 menggunakan akun pengembalian belanja (seharusnya akun penerimaan kembali belanja barang TAYL) dan sudah dilakukan jurnal balik atas transaksi pembayarannya sehingga sudah tidak muncul pada periode 31 Desember 2020.

### C.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo piutang bukan pajak pada Kementerian PP-PA merupakan piutang yang berasal dari tagihan pada pihak ketiga atas kelebihan pembayaran LS-Pihak Ketiga yang belum dilunasi/dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan. Nilai piutang bukan pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp0.

### C.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp5.030.752.374 dan Rp5.831.258.497 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 14  
Rincian Nilai Persediaan  
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kode Akun	Uraian Akun	31 DES 2020	31 DES 2019	Naik/(Turun)
117111	Barang Konsumsi	Rp 4.864.714.144	Rp 5.543.124.246	Rp (678.410.102)
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 60.696.350	Rp 17.491.100	Rp 43.205.250
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp 119.913.200	Rp (119.913.200)
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp 40.725.000	Rp 123.663.000	Rp (82.938.000)
117131	Bahan Baku	Rp -	Rp -	Rp -
117199	Persediaan Lainnya	Rp 64.616.880	Rp 27.066.951	Rp 37.549.929
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 5.030.752.374</b>	<b>Rp 5.831.258.497</b>	<b>Rp (800.506.123)</b>

Sumber : Neraca Percobaan e-rekon K/L, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Tidak terdapat Persediaan Belum Diregister pada neraca karena semua satker telah menyelesaikan registrasi Persediaan TA 2020.

Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp35.225.000 terdapat pada satker Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak yang berupa barang-barang sarana-prasarana untuk anak yang belum disalurkan ke masyarakat dan *banner* "Pusat Informasi Sahabat Anak" sebesar Rp5.527.000.

## C.5 Tanah

Nilai aset tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.358.220.000 setelah adanya *Take In* nilai revaluasi aset tetap, sehingga nilai Tanah mengalami penambahan sebesar Rp732.100.000 dari nilai semula sebesar Rp1.626.120.000.

Tanah seluas 360m<sup>2</sup> tersebut adalah tanah milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Kemen. PP-PA), yang berlokasi di Perumahan Taman Harapan Baru Bekasi Utara, Kavling S.02 No. 44-45, 46-47 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepemilikan atas Aset Tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Pakai tanggal 16 November 2011 dengan Nomor sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 102 (Kavling S.02 No. 45),
- 2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 103 (Kavling S.02 No. 44),
- 3) Sertifikat Hak Pakai Nomor 104 (Kavling S.02 No. 46), dan
- 4) Sertifikat Hak Pakai Nomor 105 (Kavling S.02 No. 47) .

keempat sertifikat tersebut telah disahkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nilai Aset Tanah tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

### C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp95.363.456.859 dan Rp95.673.691.804 atau turun sebesar Rp310.234.945 karena adanya perubahan kondisi peralatan dan mesin yang rusak atau sudah tidak digunakan dalam operasional, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 15  
Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin Periode TA 2020

<b>Saldo per 1 Januari 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>95.673.691.804</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>Rp</b>	<b>3.712.571.177</b>
Pembelian	Rp	3.158.183.657
Hibah	Rp	71.831.520
Transfer Masuk	Rp	482.556.000
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>Rp</b>	<b>4.022.806.122</b>
Penghapusan Aset	Rp	3.577.388.077
Transfer Keluar	Rp	275.418.045
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	170.000.000
Jumlah Mutasi	Rp	(310.234.945)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>95.363.456.859</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp	(84.769.412.108)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>10.594.044.751</b>

Sumber : Analisa Transaksi Perolehan dan Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Periode TA 2020

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp95.363.456.859, nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp84.769.412.108, sehingga nilai buku aset peralatan dan mesin Tahunan TA 2020 sebesar Rp10.594.044.751.

### C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp173.068.613.000 setelah adanya *Take In* nilai revaluasi sehingga nilainya naik sebesar Rp68.642.339.797 dari nilai semula sebesar Rp104.426.273.203.

Tabel 16  
Mutasi Nilai Aset Gedung dan Bangunan Periode TA 2020

<b>Saldo per 1 Januari 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>173.068.613.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Pembelian/ Perolehan	Rp	-
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Jumlah Mutasi	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>173.068.613.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp	(12.908.269.087)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>160.160.343.913</b>

Sumber : Analisa Transaksi Perolehan dan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Periode TA 2020.



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Nilai aset Gedung dan Bangunan tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp173.068.613.000, nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp12.908.269.087. sehingga nilai buku aset gedung dan bangunan Tahunan TA 2020 sebesar Rp160.160.343.913.

Nilai Aset Gedung dan Bangunan terdiri dari aset gedung kantor sebesar Rp172.632.001.000 dan bangunan milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PP-PA) yang berlokasi di Perumahan Taman Harapan Baru Bekasi Utara, Kavling S.02 No. 44-45, 46-47 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat sebesar Rp436.612.000. Nilai Aset Gedung dan Bangunan tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

### C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.152.456.725. Tidak ada mutasi perolehan maupun perubahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama periode Tahunan TA 2020. Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi:

- a) Instalasi lain-lain sebesar Rp301.559.125 pada satker 427944 MenegPP,
- b) Instalasi AC sebesar Rp4.835.397.600 pada satker 427944 MenegPP, dan
- c) Instalasi penangkal petir manual sebesar Rp15.500.000 yang tercatat pada Satker 664983 KPAI.

Saldo aset jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.152.456.725, nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp5.148.969.225 sehingga nilai buku aset jaringan periode Tahunan TA 2020 sebesar Rp3.487.500.

### C.9 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp315.310.076. Tidak ada mutasi perolehan maupun perubahan Aset Tetap Lainnya selama periode Tahunan TA 2020. Nilai Aset Tetap Lainnya tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp315.310.076 dengan rincian per sub-sub kelompok sebagai berikut:

- a) Monografi sebanyak 3.073 unit senilai Rp272.974.944;
- b) Ukiran kayu sebanyak 22 unit senilai Rp16.098.882;
- c) Alat musik modern/band sebanyak 2 unit dengan nilai Rp19.500.000; dan
- d) Lukisan cat minyak sebanyak 5 unit dengan nilai Rp6.736.250.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp315.310.076, nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp19.500.000 sehingga nilai buku aset tetap lainnya periode Tahunan TA 2020 sebesar Rp295.810.076.



### C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp102.846.150.420 dan Rp93.938.169.737. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp102.846.150.420 terdiri dari :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp84.769.412.108;
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.908.269.087;
3. Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar Rp5.148.969.225; dan
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.500.000.

Tabel 17  
Rincian Nilai Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Periode Tahun Anggaran 2020					Nilai Buku Aset
		Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2019	Penyusutan TA 2020	Penyusutan Transaksional	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2020	
1	Tanah	Rp 2.358.220.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.358.220.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 95.363.456.859	Rp 79.552.158.307	Rp 8.671.674.136	Rp (3.454.420.335)	Rp 84.769.412.108	Rp 10.594.044.751
3	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	Gedung dan Bangunan	Rp 173.068.613.000	Rp 9.220.192.205	Rp 3.688.076.882	Rp -	Rp 12.908.269.087	Rp 160.160.343.913
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 5.152.456.725	Rp 5.148.194.225	Rp 775.000	Rp -	Rp 5.148.969.225	Rp 3.487.500
6	Aset Tetap Lainnya	Rp 315.310.076	Rp 17.625.000	Rp 1.875.000	Rp -	Rp 19.500.000	Rp 295.810.076
	JUMLAH	Rp 276.258.056.660	Rp 93.938.169.737	Rp 12.362.401.018	Rp (3.454.420.335)	Rp 102.846.150.420	Rp 173.411.906.240

Sumber : Analisa Transaksi Perolehan dan Mutasi Penyusutan Aset Tetap Periode TA 2020.

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap naik sebesar Rp8.907.980.683 berupa transaksi Beban penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.362.401.018 yang terdiri dari:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.671.674.136;
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.688.076.882;
3. Beban Penyusutan Jaringan sebesar Rp775.000; dan
4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.875.000.

### C.11 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen.PPPA) berupa *software* komputer. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp15.642.888.379 dan Rp17.798.326.700. Mutasi perolehan Aset Tak Berwujud sebesar Rp25.000.000 terjadi pada satker Deputi Kesetaraan Gender berupa pembelian *software*.

Nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.642.888.379, akumulasi amortisasinya sebesar Rp15.135.326.397 sehingga nilai buku *software* Tahunan TA 2020 sebesar Rp507.561.982.



### C.12 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen. PP-PA) merupakan Aset Tetap/Aset Lainnya yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp356.500.000 dan Rp618.114.185.

Aset Lain-lain sebesar Rp356.500.000 terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp170.000.000 dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional sebesar Rp186.500.000. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan sebesar Rp186.500.000, sedangkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp170.000.000.

### C.13 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp15.491.826.397 dan Rp15.871.117.549. Nilai Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya naik sebesar Rp379.291.152.

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 berupa:

1. Akumulasi Amortisasi *Software* Komputer sebesar Rp15.135.326.397;
2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak Digunakan sebesar Rp186.500.000;
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional sebesar Rp170.000.000.

### C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp100.000.000.

Saldo utang kepada pihak ketiga sebesar Rp100.000.000 pada periode 31 Desember 2019 berupa Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (tunggakan tahun 2018) pada satker dengan kode satker 664960 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat sudah diselesaikan pada awal periode TA 2020.

### C.15 Hibah yang Belum Disahkan

Nilai hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar sebesar Rp1.252.147.011 dan Rp1.713.630.436 berupa hibah langsung dalam bentuk uang periode TA 2015 yang dikelola satker 664958



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) senilai Rp1.252.147.011 dengan kode register K071509501 Hibah tersebut diterima dalam mata uang dollar amerika yang di ekuivalenkan dalam mata uang rupiah pada saat penerimaan hibah dan sudah diregister. Atas penerimaan hibah tersebut belum dilakukan pengesahan atas transaksi belanjanya karena proses revisi anggaran yang tidak dapat dilakukan sebab telah melewati batas waktu perpanjangan revisi anggaran yang ditetapkan sebagaimana surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1883/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan dan Penyelesaian Administrasi atas Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN *Audited* TA 2015.

Hibah TA 2015 yang dikelola satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak (Hibah dari UNICEF) senilai Rp461.483.425 dengan kode register K071539501 telah diselesaikan sebagai tindak lanjut surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S-876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu. Sedangkan Hibah TA 2015 sebesar sebesar Rp1.252.147.011 yang dikelola satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan (sekarang Deputi Perlindungan Hak Perempuan) masih dalam proses penyelesaian sampai batas akhir dispensasi penyelesaian Hibah TAYL pada tanggal 23 April 2021. Proses penyelesaian administrasi sempat terkendala karena adanya pergantian KPA sehingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan SK KPA terbaru. Sampai laporan ini disusun, satker Deputi Perlindungan Hak Perempuan masih berkoordinasi dengan KPPN Hibah untuk mempersiapkan dokumen-dokumen penyelesaian Hibah TAYL jika nanti dispensasi penyelesaian Hibah TAYL dibuka kembali.

### **C.16 Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan diterima dimuka pada Kemen.PPPA periode Tahunan TA 2020 berupa pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang berasal dari kontrak perjanjian sewa tanah dan bangunan atas penempatan mesin ATM Bank Mandiri di Kantor Kemen. PP-PA. Nilai pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 karena sedang dilakukan penilaian kembali terhadap harga sewa mesin ATM Bank Mandiri dalam rangka pembaharuan perjanjian sewa.

### **C.17 Uang Muka dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) dan atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.443.250 dan Rp177.838.780.



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 terdiri dari Uang Persediaan sebesar Rp3.443.250 yang sudah disetorkan pada tanggal 19 Februari 2021. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 sebesar Rp177.838.780 sudah dipertanggungjawabkan pada awal tahun 2020.

### **C.18 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0.

### **C.19 EKUITAS**

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp177.767.790.167 dan Rp188.632.295.519. Nilai penurunan Ekuitas periode 1 Januari - 31 Desember 2020 sebesar Rp10.864.505.352. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional yang dilakukan Satuan Kerja. Nilai Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp23.183.909 dan Rp72.971.138.

Pendapatan-LO sebesar Rp23.183.909 meliputi Pendapatan akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp21.099.000, 425811 Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebesar Rp1.342.000 dan pendapatan akun 425999 Anggaran Lain-lain sebesar Rp742.909 berupa transaksi pengembalian belanja pegawai yang berasal dari potongan SPM.

### **D.2. BEBAN OPERASIONAL**

#### **D.1.2 Beban Pegawai**

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah beban pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp47.412.373.226 dan Rp46.162.493.965 dengan rincian nilai sebagai berikut:



Tabel 18  
Rincian Nilai Beban Pegawai  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Periode		Selisih Naik/(Turun)	
		31 DES 2020	31 DES 2019	Nilai	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	Rp 13.686.915.060	Rp 12.738.783.200	Rp 948.131.860	7,44%
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp (2.546.710)	Rp 188.715	Rp (2.735.425)	-1449,50%
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 780.459.836	Rp 751.917.132	Rp 28.542.704	3,80%
511122	Beban Tunj. Anak PNS	Rp 192.832.088	Rp 192.087.162	Rp 744.926	0,39%
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 3.600.145.000	Rp 3.646.785.000	Rp (46.640.000)	-1,28%
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 60.900.000	Rp 64.700.000	Rp (3.800.000)	-5,87%
511125	Beban Tunj. PPh PNS	Rp 185.220.157	Rp 204.898.038	Rp (19.677.881)	-9,60%
511126	Beban Tunj. Beras PNS	Rp 566.107.140	Rp 539.456.580	Rp 26.650.560	4,94%
511129	Beban Uang Makan PNS	Rp 2.606.559.000	Rp 1.317.875.000	Rp 1.288.684.000	97,78%
511147	Beban Tunj. Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
511151	Beban Tunj. Umum PNS	Rp 339.120.000	Rp 338.735.000	Rp 385.000	0,11%
511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	Rp 2.266.256.000	Rp 1.395.000.000	Rp 871.256.000	62,46%
511512	Beban Tunj. Pegawai Non PNS	Rp 170.629.650	Rp 157.500.000	Rp 13.129.650	8,34%
512211	Beban Uang Lembur	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	Rp 22.959.776.005	Rp 24.814.568.138	Rp (1.854.792.133)	-7,47%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 47.412.373.226</b>	<b>Rp 46.162.493.965</b>	<b>Rp 1.249.879.261</b>	<b>2,71%</b>

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akruar e-rekon K/L Periode 31 Desember 2020 dan 2019.

#### D.2.2 Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Jumlah beban persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.309.257.895 dan Rp8.683.174.084 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 19  
Rincian Nilai Beban Persediaan  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Periode		Selisih Naik/ (Turun)	
		31 DES 2020	31 DES 2019	Nilai	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 7.263.132.910	Rp 8.583.884.968	Rp (1.320.752.058)	-15,39%
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
593149	Beban Persediaan Lainnya	Rp 46.124.985	Rp 99.289.116	Rp (53.164.131)	-53,54%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 7.309.257.895</b>	<b>Rp 8.683.174.084</b>	<b>Rp (1.373.916.189)</b>	<b>-15,82%</b>

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akruar e-rekon K/L Periode 31 Desember 2020 dan 2019.

Beban Persediaan Bahan Baku sebesar Rp17.500.000 yang terdapat pada satker dekonsentrasi Provinsi Aceh terbentuk karena adanya kesalahan pencatatan pada aplikasi Persediaan sehingga membentuk akun Beban Persediaan Bahan Baku yang



seharusnya nihil. Kesalahan pencatatan tersebut sudah diperbaiki sehingga nilai tersebut masuk ke Beban Persediaan Konsumsi.

### D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pada Kemen. PP-PA. Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp79.865.414.608 dan Rp150.213.784.257 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 20  
Rincian Nilai Beban Barang dan Jasa  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Periode		Selisih Naik/(Turun)	
		31 DES 2020	31 DES 2019	Nilai	%
521111	Beban Keperluan Perkantoran	Rp 13.284.784.448	Rp 12.815.152.812	Rp 469.631.636	3,66%
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 226.695.206	Rp 77.517.500	Rp 149.177.706	192,44%
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 80.876.101	Rp 132.521.250	Rp (51.645.149)	-38,97%
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 2.516.534.000	Rp 3.349.192.000	Rp (832.658.000)	-24,86%
521119	Beban Barang Opr. Lainnya	Rp 3.056.263.196	Rp 4.026.451.875	Rp (970.188.679)	-24,10%
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 1.660.718.120	Rp -	Rp 1.660.718.120	100,00%
521211	Beban Bahan	Rp 5.139.538.963	Rp 30.733.718.416	Rp (25.594.179.453)	-83,28%
521213	Beban Honor Output Kegiatan	Rp 3.279.270.250	Rp 5.571.836.000	Rp (2.292.565.750)	-41,15%
521219	Beban Barang Non Opr. Lainnya	Rp 964.814.851	Rp 6.141.832.457	Rp (5.177.017.606)	-84,29%
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	Rp 31.500.000	Rp -	Rp 31.500.000	100,00%
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 813.985.500	Rp -	Rp 813.985.500	100,00%
522111	Beban Langganan Listrik	Rp 2.518.376.431	Rp 2.446.729.674	Rp 71.646.757	2,93%
522112	Beban Langganan Telepon	Rp 109.537.784	Rp 100.466.573	Rp 9.071.211	9,03%
522113	Beban Langganan Air	Rp 595.776.664	Rp 553.317.786	Rp 42.458.878	7,67%
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp 1.933.725.925	Rp 2.446.424.258	Rp (512.698.333)	-20,96%
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	Rp 41.551.000	Rp 66.813.000	Rp (25.262.000)	-37,81%
522131	Beban Jasa Konsultan	Rp 5.683.744.615	Rp 7.541.826.945	Rp (1.858.082.330)	-24,64%
522141	Beban Sewa	Rp 8.208.488.918	Rp 8.685.139.439	Rp (476.650.521)	-5,49%
522151	Beban Jasa Profesi	Rp 11.677.097.159	Rp 28.197.069.000	Rp (16.519.971.841)	-58,59%
522191	Beban Jasa Lainnya	Rp 15.228.541.897	Rp 37.327.775.272	Rp (22.099.233.375)	-59,20%
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 2.813.593.580	Rp -	Rp 2.813.593.580	100,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 79.865.414.608</b>	<b>Rp 150.213.784.257</b>	<b>Rp (70.348.369.649)</b>	<b>-46,83%</b>

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akruar e-rekon K/L Periode 31 Desember 2020 dan 2019.

### D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban



pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp14.992.811.574 dan Rp16.596.918.307 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 21  
Rincian Nilai Beban Pemeliharaan  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Periode		Selisih Naik/(Turun)	
		31 DES 2020	31 DES 2019	Nilai	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 11.801.982.487	Rp 12.285.046.046	Rp (483.063.559)	-3,93%
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 3.114.470.081	Rp 4.204.768.361	Rp (1.090.298.280)	-25,93%
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 76.359.006	Rp 107.103.900	Rp (30.744.894)	-40,26%
JUMLAH		Rp 14.992.811.574	Rp 16.596.918.307	Rp (1.604.106.733)	-9,67%

Sumber : Neraca Percobaan Basis AkruaI e-rekon K/L Periode 31 Desember 2020 dan 2019.

#### D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp34.371.142.327 dan Rp226.861.813.886 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 22  
Rincian Nilai Beban Perjalanan Dinas  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Periode		Selisih Naik/(Turun)	
		31 DES 2020	31 DES 2019	Nilai	%
524111	Beban Perjalanan Biasa	Rp 13.792.129.692	Rp 66.662.206.207	Rp (52.870.076.515)	-79,31%
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 613.020.000	Rp 1.293.632.452	Rp (680.612.452)	-52,61%
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 8.540.856.005	Rp 53.454.366.191	Rp (44.913.510.186)	-84,02%
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 1.093.867.654	-	Rp 1.093.867.654	100,00%
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 10.329.968.976	Rp 99.443.813.702	Rp (89.113.844.726)	-89,61%
524211	Beban Perjalanan Biasa - LN	Rp 1.300.000	Rp 4.333.945.865	Rp (4.332.645.865)	-99,97%
524219	Beban Perjalanan Lainnya - LN	Rp -	Rp 1.673.849.469	Rp (1.673.849.469)	-100,00%
JUMLAH		Rp 34.371.142.327	Rp 226.861.813.886	Rp (192.490.671.559)	-84,85%

Sumber : Neraca Percobaan Basis AkruaI e-rekon K/L Periode 31 Desember 2020 dan 2019.

Penurunan signifikan Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp192.490.671.559 disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menjadi hambatan pelaksanaan perjalanan dinas.



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

### D.2.6 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban atas serah terima bantuan pemerintah dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat/pemda dalam rangka penguatan kelembagaan, tugas, fungsi, dan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp16.742.136.649 dan Rp 26.873.304.273 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 23  
Rincian Nilai Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Periode		Selisih Naik/(Turun)	
		31 DES 2020	31 DES 2019	Nilai	%
593124	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	Rp 309.029.700	Rp 21.567.605.400	Rp (21.258.575.700)	-98,57%
526122	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masy/Pemda dalam bentuk Uang	Rp -	Rp 1.534.779.228	Rp (1.534.779.228)	0,00%
526123	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp 50.000.000	Rp (50.000.000)	-100,00%
593128	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	Rp 16.433.106.949	Rp 3.720.919.645	Rp 12.712.187.304	77,36%
JUMLAH		Rp 16.742.136.649	Rp 26.873.304.273	Rp (10.131.167.624)	-37,70%

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrua e-rekon K/L Periode 31 Desember 2020 dan 2019.

### D.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp14.397.644.551 dan Rp21.698.172.718 dengan rincian nilai sebagai berikut:



Tabel 24  
Rincian Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Periode		Selisih Naik/ (Turun)	
		31 DES 2020	31 DES 2019	Nilai	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 8.671.674.136	Rp 13.726.579.988	Rp (5.054.905.852)	-36,83%
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 3.688.076.882	Rp 3.688.076.882	Rp -	0,00%
591313	Beban Penyusutan Jaringan	Rp 775.000	Rp 514.470.672	Rp (513.695.672)	-99,85%
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp 1.875.000	Rp 3.750.000	Rp (1.875.000)	-50,00%
592115	Beban Amortisasi Software	Rp 2.016.499.783	Rp 3.746.551.426	Rp (1.730.051.643)	-46,18%
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	Rp 18.743.750	Rp 18.743.750	Rp -	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 14.397.644.551</b>	<b>Rp 21.698.172.718</b>	<b>Rp (7.300.528.167)</b>	<b>-33,65%</b>

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrua e-rekon K/L Periode 31 Desember 2020 dan 2019.

### D.3 SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.276.694.997 dan Rp1.048.874.928 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 25  
Rincian Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional  
Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun	Uraian	Periode		Selisih Naik/ (Turun)	
		31 DES 2020	31 DES 2019	Nilai	%
423129	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp 1.108.293.555	Rp 44.697.000	Rp 1.063.596.555	95,97%
596111	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Rp 215.035.070	Rp 59.957.159	Rp 155.077.911	72,12%
491511	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 2.497.304.857	Rp 1.153.673.515	Rp 1.343.631.342	53,80%
593311	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 113.868.345	Rp 89.538.428	Rp 24.329.917	21,37%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 3.276.694.997</b>	<b>Rp 1.048.874.928</b>	<b>Rp 2.227.820.069</b>	<b>67,99%</b>

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akrua e-rekon K/L Periode 31 Desember 2020 dan 2019



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Saldo surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp3.276.694.997 meliputi:

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.108.293.555 berupa penerimaan yang berasal dari hasil lelang pelepasan/penghapusan aset;
2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp215.035.070 berupa beban 596111 kerugian pelepasan aset
3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.497.304.857 berupa Pendapatan 491511 penyesuaian nilai persediaan, dan
4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp113.868.345 berupa beban 593311 penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp95.641.845 dan Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp18.226.500.

### D.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Nilai Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 masing-masing sebesar Rp188.632.295.519 dan Rp129.556.664.637.

### E.2 SURPLUS/(DEFISIT) LO

Surplus/(Defisit)-LO merupakan penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/(Defisit) kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Surplus/(Defisit)-LO per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Defisit-LO Rp211.790.901.924 dan Rp495.967.815.424.

### E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS

#### E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp100.000.000. Koreksi nilai persediaan pada periode 31 Desember 2019 merupakan koreksi atas nilai saldo awal persediaan pada satker dengan kode satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan atas barang persediaan yang diperoleh pada tahun 2018 namun pembayarannya dilakukan pada tahun 2019 melalui mekanisme tunggakan dan sudah dilakukan jurnal balik untuk transaksi tersebut.



### **E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp12.731.250. Koreksi atas reklasifikasi pada periode 31 Desember 2019 berupa koreksi tambah nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas transaksi perubahan pencatatan aset peralatan dan mesin yang tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Tidak ada Koreksi atas Reklasifikasi pada periode 31 Desember 2020.

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp732.100.000 yang merupakan nilai revaluasi Tanah dan Rp76.122.689.506 yang merupakan nilai revaluasi Gedung.

### **E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas nilai aset dan/atau penyusutan aset tanpa melalui proses revaluasi/penilaian kembali. Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan minus Rp2.391.748.236 yang merupakan penyusutan transaksional reval bangunan.

### **E.3.5 Koreksi Lainnya**

Saldo Koreksi Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp71.322.254 dan Rp156.505.196. Nilai Koreksi Lainnya merupakan koreksi atas pengakuan pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (pengembalian belanja tahun yang lalu disetor pada tahun 2019) yang belum dilakukan pengakuan atas pengurang bebannya dan belum diungkapkan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas pada periode berjalan.

Saldo Koreksi Lainnya pada periode 31 Desember 2020 sebesar minus Rp71.322.254 dapat dirinci sebagai berikut :

- ❖ Koreksi sebesar Rp 167.102.406 merupakan pengesahan pengembalian Hibah 2018 pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA yang berasal dari UNFPA yang telah diselesaikan pada tahun 2020
- ❖ Koreksi sebesar Rp4.219.848 merupakan koreksi atas pengembalian belanja tahun 2018 atas kelebihan pembayaran belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang sebesar Rp4.219.848 yang penyetorannya dilakukan pada tahun 2019 menggunakan akun pengembalian belanja (seharusnya akun penerimaan kembali belanja barang TAYL) dan sudah dilakukan jurnal balik atas transaksi pembayarannya sehingga menjadi saldo Koreksi Lainnya pada periode 31 Desember 2020



- ❖ Koreksi sebesar minus Rp100.000.000 merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga pada satker Deputi Perlindungan Hak Perempuan yang telah diselesaikan dan telah dilakukan jurnal balik atas transaksi pembayarannya.

#### E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi antar entitas merupakan transaksi antara Satuan Kerja pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Bendahara Umum Negara (BUN) yang didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Nilai transaksi antar entitas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp200.265.618.826 dan Rp481.043.268.590 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 26  
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas  
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kode Akun	Uraian	Periode		Selisih Naik/(Turun)	
		31 DES 2020	31 DES 2019	Nilai	%
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 196.842.426.155	Rp 477.732.663.780	Rp (280.890.237.625)	-58,80%
313121	Diterima dari Entitas Lain	Rp (3.505.098.537)	Rp (3.606.815.371)	Rp 101.716.834	-2,82%
313211	Transfer Keluar	Rp (51.345.967)	Rp -	Rp (51.345.967)	100,00%
313221	Transfer Masuk	Rp 143.058.750	Rp -	Rp 143.058.750	100,00%
391131	Pengesahan Hibah Langsung	Rp 6.378.939.348	Rp 6.952.193.670	Rp (573.254.322)	-8,25%
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	Rp (3.844.348)	Rp (34.773.489)	Rp 30.929.141	-88,94%
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	Rp 461.483.425	Rp -	Rp 461.483.425	100,00%
JUMLAH		Rp 200.265.618.826	Rp 481.043.268.590	Rp (280.777.649.764)	-58,37%

Sumber : Neraca Percobaan Basis Akruar e-rekon K/L Periode 31 Desember 2020 dan 2019

Terdapat Transfer Keluar BMN senilai Rp51.345.967 dan Transfer Masuk BMN senilai Rp143.058.750 antara Kementerian PP-PA dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sehubungan dengan dilakukannya pertukaran BMN pada Rumah Dinas Jabatan Ex. Menteri PP-PA yang terletak di Jalan Denpasar Raya Blok C3 No.1 ke Rumah dinas Menteri KUKM yang terletak di Komplek Perumahan Menteri Jalan Widya Chandra III No.12A, sehingga terjadi pengalihan status pengguna Barang Milik Negara.

#### E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp177.767.790.167 dan Rp188.632.295.519. Nilai Ekuitas periode 1 Januari – 31 Desember 2020 turun sebesar Rp10.864.505.352.



## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1. KEJADIAN -KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN

#### 1. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mulai merebak pada awal tahun 2020, sehingga dampak dari pandemi COVID-19 tersebut belum terlihat pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2019. Dampak pandemi COVID-19 akan disajikan pada LKKL, LK BUN dan LKPP Tahun Anggaran 2020.

Pedoman penyusunan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahunan tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, dan Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 Tanggal 30 Desember 2020. Penyajian akun-akun Penanganan Pandemi COVID-19 merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagian Akun Standar.

*Refocusing* dan Realokasi Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp72.864.317.000 akan disajikan dalam bentuk tabel pada lampiran Laporan Keuangan ini.

### F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

#### 1. Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Kementerian Sekretariat Negara oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Unit perkantoran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat menempati lahan milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Penggunaan lahan Kemensetneg tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Nomor: PERJ-09/Setneg/Sesmen/07/2009 Tanggal 2 Juli 2009.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa masa pinjam pakai lahan berakhir pada tanggal 2 Juli 2011. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memproses perpanjangan perjanjian pinjam pakai lahan tersebut sebagai tindak lanjut rekomendasi pemeriksa pada tanggal 26 Juni 2020.



## 2. Hibah yang Belum Disahkan

Nilai Hibah yang belum disahkan sebesar Rp1.252.147.011 meliputi hibah langsung dalam bentuk uang periode TA 2015 yang dikelola satker 664958 Deputy Bidang Perlindungan Perempuan (Hibah dari UNFPA) senilai Rp1.252.147.011 dengan kode register K071509501. Hibah tersebut diterima dalam mata uang dollar amerika yang di ekuivalenkan dalam mata uang rupiah pada saat penerimaan hibah dan sudah diregister.

Perkembangan terakhir, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya satker Deputy Perlindungan Hak Perempuan sedang melakukan penatausahaan dokumen hibah sambil menunggu periode dispensasi penyelesaian Hibah TAYL selanjutnya dalam rangka proses penyelesaian administrasi hibah dimaksud.

## 3. Jurnal Tidak Lazim pada Aplikasi E-Rekon

Terdapat jurnal tidak lazim pada aplikasi E-Rekon yang terjadi pada satker Deputy Bidang Kesetaraan Gender sebesar Rp10.635.000. Jurnal tersebut merupakan koreksi nilai persediaan untuk akun 526322 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang – Penanganan Pandemi COVID-19 karena adanya retur pembuatan dan pendistribusian masker kain sebesar Rp5.317.500 pada SPM 129 dan sebesar Rp5.317.500 pada SPM 130.

## 4. Hibah Langsung berupa Jasa senilai Rp1.542.478.394 dari UNFPA

Pada tahun 2020 KPPPA mendapatkan hibah langsung berupa jasa dari *United Nation Population Fund* (UNFPA) sebesar Rp1.542.478.394 atau setara dengan USD 107.469,37 dengan perjanjian hibah nomor 24F4CMA yang dikelola oleh satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan hibah ini dilakukan dalam rangka kegiatan program UNFPA, Output IDN09GEN. Kegiatan Hibah tersebut dilakukan pada periode Januari s.d Desember Tahun 2020 dengan rincian terlampir pada Laporan Keuangan ini.

## 5. Hibah Langsung berupa Jasa senilai Rp2.054.387.083 dari UNICEF

Pada tahun 2020 KPPPA mendapatkan hibah langsung berupa jasa dari *United Nations Children Fund* (UNICEF) sebesar Rp2.054.387.083 atau setara dengan USD 140.471 yang tertuang pada Perjanjian Hibah Program Kerjasama RI-UNICEF Periode 2016-2020 sesuai *Programme Document (ProDoc)* tanggal 28 Maret 2016 yang dikelola oleh satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dengan rincian terlampir pada Laporan Keuangan ini.



## LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

### 6. Hibah Langsung berupa Barang senilai Rp71.831.520 dari KOICA

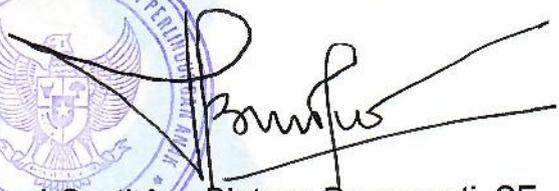
Pada tahun 2020 KPPPA mendapatkan Hibah Langsung berupa Barang dari Korea International Cooperation Agency (KOICA) sebesar Rp71.831.520 atau setara dengan USD 1.279,96 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah berupa Barang pada tanggal 2 November 2020 dengan nomor: BAST-972/Set/KPP-PA/Roum/RT/11/2020 dengan rincian terlampir pada Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 4 Mei 2021

Penanggungjawab UAPA,

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia,



  
I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE., M.Si.



## Lampiran dan Daftar





**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15  
Jakarta Pusat